

PERMASALAHAN ANAK DALAM PENGUNGSIAN DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (Children's Problems on the Refuge in Nanggroe Aceh Darussalam)

Yanuar Farida WISMAYANTI

Abstract Restoration of post disaster area is a big agenda to recovery this area and to build life of system. Nature of disaster, earthquakes and tsunamis in Aceh (26/12/1004), this moment has attracted the attention from around the world to help and give support for peoples in disaster area. For that, some of different effort to recovery this area, involving the stakeholder, built a networking, develop and support a soladirity with a humanity of sense. A part of the big agenda of Aceh Recovery, it's very important to give a chance for children to be actor in this agenda, considering with the best for the children principles.

Key Words: children, recovery, humanity sense

1. PENDAHULUAN

Duka yang menyelimuti warga Aceh belum berakhir, konflik berkepanjangan telah merenggut banyak korban. Meskipun sudah banyak upaya pemulihan untuk mewujudkan penyelesaian konflik Aceh melalui berbagai pendekatan, seperti "Jeda kemanusiaan", "moratorium", "dialog dalam damai", bahkan penetapan Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam yang bersyariah Islam mulai dicanangkan. Namun fakta yang terbentang adalah Aceh masih berkutut dengan konflik yang berkepanjangan. Seiring dengan hal itu korban masih berjatuhan, sejak Agustus 1998 sampai Mei 2002, sudah 4.210 manusia yang meninggal, di antaranya termasuk anak-anak dan perempuan sebagai kelompok yang paling rentan. (Anonim, 2002, hal 24).

Kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut, disusul dengan bencana gempa bumi dan gelombang tsunami yang meluluhlantahkan Aceh dan Sumatera Utara pada 26 Desember 2004 dan jatuh korban ratusan ribu orang disusul gempa Nias pada 27 Maret 2005. *Restorasi* atau pembangunan kembali itu diperkirakan mencapai Rp. 20 triliun. (Anonim, 2005, hal 2).

Secara faktual dapat digambarkan bahwa bencana alam gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 pada pukul 07.58 WIB terjadi di wilayah pesisir Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Bencana ini telah menghancurkan Kota Banda Aceh, Kota Meulaboh, wilayah Pantai Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Negan Raya, Kabupaten Simeuleue, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur dan delapan kabupaten/kota lainnya di Nanggroe

- , "Total Bantuan Untuk Aceh Dapai 914 Milyar", *Media Indonesia* 27 Januari 2005.
- Departemen Sosial RI 2003. *Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta; Departemen Sosial RI.
- Departemen Sosial RI 2003. *Pedoman Umum Bantuan Sosial Korban Bencana Alam*. Jakarta; Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam - Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Jakarta, 2003.
- , *Rekapitulasi Data Kejadian Bencana Periode Bulan*. Jakarta; Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial.
- Nugroho, Sumarno T. 1984. *Intervensi Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta : Kanisius.
- Pincus, Allan dan Anne Minahan, .1973. *Social Work Praticice : Model and Methode*. Illinois - USA : FE Peacock Phubliser Inc.
- Soetarso. 1980. *Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial dan Kebijakan Sosial*. Bandung : KOPMA STKS.
- Siporin, Max. 1975. *Introduction to Sosial Work Practice*. New York : Macmillan Phu-bliser Co Inc.
- Thufail, Fadjar I, "Kekerasan, Bencana dan Trauma", *KOMPAS*, 11 Januari 2005.
- Warto (dkk), 2002. *Pengkajian Manajemen Penanggulangan Korban Bencana Pada Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Alam dalam Era Otonomi Daerah (Kasus Kabupaten Sukabumi)* Yogyakarta; Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

SURADI, Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Balatbangsos, Depsos RI.

Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Wilayah yang rusak mencapai 10.000 km² di 22 kabupaten/kota. Gempa bumi dan tsunami ini merupakan terbesar keempat setelah yang terjadi pada tahun 1990 dan yang terbesar setelah Gempa di Prince Sound Alaska pada tahun 1964.

Peristiwa gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh, cukup membuat kita semua terhenyak atas peristiwa tersebut. Dunia internasional memberikan perhatian yang cukup besar, bantuan dari para donatur dalam negeri maupun bantuan internasional diberikan dalam berbagai bentuk, berupa sumbangan murni, hibah maupun dalam bentuk jaminan lunak. Berbagai bentuk bantuan yang diberikan untuk memulihkan Aceh dalam Pembangunan kembali wilayah (*Restorasi*) Pascabencana menjadi sebuah agenda besar bagi keberlanjutan pembangunan di Aceh. Sebagian di antara kita tentunya mempertanyakan, dimanakan anak-anak Aceh dalam program penyaluran dana ini, adakah mereka menjadi prioritas, dapatkah luka dan bebannya terbantu dan terpulihkan? Dapatkah duka mereka yang telah kehilangan orangtua, saudara dan teman-teman mereka, serta rumah mereka dapat terobati? Bagi kita dan mungkin sebagian besar anak-anak Aceh, jumlah uang tersebut mungkin tak terbayangkan, dan yang pasti itu bukanlah satu-satunya program pemulihan Aceh.

Bencana alam dan gelombang tsunami tersebut telah membawa banyak korban, termasuk anak-anak. Sebagian besar mereka meninggal dunia, mengalami luka-luka, dan tidak sedikit yang kehilangan tempat tinggal mereka.

Akibatnya mereka menjadi pengungsi, mereka terdiri dari orang dewasa laki-laki dan perempuan juga anak-anak. Sedangkan yang dimaksud dengan pengungsi anak adalah orang atau orang berusia 18 tahun ke bawah, belum menikah, dan menjadi pengungsi baik bersama orang tuanya maupun tidak, serta berada dalam pengungsian.

Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian masalah pengungsi anak ini, dibagi menjadi beberapa tahapan sesuai dengan tumbuh kembang anak, dengan sasaran utama tentang kebijakan dasar penyelesaian masalah pengungsi anak, adalah ; *Pranatal*; usia bawah tiga tahun (0-3 tahun); usia pra sekolah (4-6 tahun); usia sekolah dasar (7-12 tahun); usia SLTP (13 -15 tahun); usia SLTA (16 18 tahun). Sedangkan sasaran pendukung yaitu segenap organisasi pemerintah dan non pemerintah yang terkait dengan masalah pengungsi umumnya dan masalah pengungsi anak khususnya. Sedangkan pada lokasi pengungsian, sasaran pendukung adalah organisasi masyarakat setempat atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Dengan mempertimbangkan prinsip dasar dalam penanggulangan pasca bencana di antaranya adalah : masalah sosial adalah masalah kemanusiaan, tidak mengenal lintas batas negara dan issue Suku, Agama, Ras dan Adat Istiadat (SARA), serta prinsip Kemandirian (*How to help the people themself*). Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi anak di Aceh.

2. BENCANA ALAM

Beberapa pengertian tentang bencana, disebutkan dalam *Disaster Management, A Disaster Manager's Handbook, "An event, natural or man-made, sudden or progressive, which impacts with such severity that the effected community has to respond by taking exceptional measures"* Berdasarkan pengertian tersebut, perlu dibedakan antara sekedar banjir, gunung meletus atau tsunami yang terjadi di daerah tanpa atau kurang padat penduduknya tapi tanpa menimbulkan dampak kerugian yang berarti, dibandingkan dengan banjir, gunung meletus dan tsunami di daerah padat penduduk yang menimbulkan banyak korban dan kerugian sebagai Bencana. Menurut Sudibyo Markus (2005) bencana tsunami di Aceh menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda begitu besar, kondisi ini layak disebut sebagai *great disruption*, karena banyaknya korban jiwa dan harta benda maupun pengaruh terhadap tidak berfungsinya sistem pemerintahan dan tatanan hidup setempat.

Tanggal 6 Januari 2005 di Jakarta telah diadakan konferensi khusus para pemimpin ASEAN Pasca gempa bumi dan tsunami (*Special ASEAN Leaders Meeting on Aftermath of Earthquakes and Tsunamis*) yang diikuti oleh 25 Negara dan lembaga Internasional. Konferensi ini membahas secara khusus tentang program bantuan bagi negara Asia yang terkena badai tsunami. Kegiatan ini menjadi peristiwa yang penting, sebagai salah satu bentuk perhatian dunia internasional atas bencana yang menimpa sebagian besar negara di Asia. Komitmen negara peserta untuk memberikan dukungan dan menggalang dana untuk pemulihan daerah

pascabencana, menjadi salah satu agenda yang penting bagi negara-negara yang terkena bencana untuk melakukan pemulihan di wilayahnya.

1. Pengungsi Anak

Ada beberapa strategi untuk mengatasi persoalan pengungsi anak (Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI, Kantor Masalah-Masalah Kemasyarakatan, 2002 ; 11-12) antara lain :

- a. *Penyelamatan*, untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang pengungsi anak dengan melakukan suatu tindakan segera baik terhadap kondisi darurat untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikis maupun sosialnya.
- b. *Perlindungan*, terhadap berbagai tindakan atau kejadian penelantaran dan perlakuan salah terhadap pengungsi anak dengan memberikan rasa aman dan pemenuhan kebutuhan hak-hak sipil dan kebebasan.
- c. *Pemberdayaan*, untuk memberikan kemampuan anak melaksanakan tugas-tugas kehidupan di rumah, sekolah, pertemanan, dan lingkungan ketetapan sesuai perannya sebagai anak.
- d. *Pemulihan*, terhadap gangguan psikososial yang dialami pengungsi anak akibat peristiwa-peristiwa traumatis yang dialaminya selama kejadian yang menyebabkan pengungsian, perjalanan mengungsi, dan dalam kehidupan pengungsian.
- e. *Pemaduan Program*, penyelesaian untuk anak, ibu, dan anak

keseluruhan penyelesaian masalah pengungsi.

- f. *Pendayagunaan Kader dan Potensi lokal*, baik dari warga pengungsi, warga masyarakat sekitar lokasi pengungsian dan institusi masyarakat setempat.

Bencana di Nanggroe Aceh Darussalam telah menelan ribuan korban meninggal dunia, dan jutaan orang menjadi pengungsi, di antara pengungsi tersebut tentunya terdapat anak-anak yang menjadi bagian dari

komunitas pengungsi. Anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan perlu mendapatkan perlindungan khusus dalam rangka pemenuhan haknya. Berbagai permasalahan dialami oleh anak-anak di pengungsian, sehingga memerlukan penanganan khusus bagi pengungsi anak.

Departemen Sosial, melakukan pendataan terhadap pengungsi anak di 14 Kabupaten di NAD. Rekapitulasi pengungsi anak di NAD dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1: Rekapitulasi Pengungsi Anak di NAD Per Kabupaten Per-4 Juli 2005

NO	KABUPATEN/ KOTA	Jumlah anak usia < 5 tahun		JML	Jumlah Anak Usia 5-18 tahun		JML	JUMLAH TOTAL
		L	P		L	P		
1.	Banda Aceh	467	459	926	946	1040	1986	2912
2.	Aceh Besar	683	589	1272	2281	1768	4049	5321
3.	Pidie	165	120	285	1004	767	1771	2056
4.	Bireun	8	7	15	152	114	266	281
5.	Lhokseumawe	109	108	217	392	383	775	992
6.	Aceh Barat	168	110	278	865	657	1522	1800
7.	Aceh Utara	119	92	211	647	606	1253	1464
8.	Aceh Jaya	94	89	183	261	236	497	680
9.	Aceh Tamiang	14	7	21	17	19	36	57
10.	Langsa	6	4	10	4	2	6	16
11.	Bener Meriah	5	6	11	5	10	15	26
12.	Aceh Barat Daya	2	1	3	6	7	13	16
13.	Aceh Tengah	14	7	21	12	20	32	53
	JUMLAH	1854	1599	3453	6592	5629	12221	15674

Sumber : Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak Departemen Sosial RI, 2005

Angka-angka jumlah pengungsi anak tersebut tentunya akan bertambah besar dan mungkin jauh lebih besar, begitu juga tentunya dengan "dana" yang mengalir ke Aceh yang juga berasal dari berbagai sumber. Namun, bila kita hanya berpatokan pada angka, mungkin sampai saat ini pun belum tentu di dapatkan data yang akurat dan rinci berapa jumlah anak-anak pengungsi. Dimana persebaran dan perkembangan tumbuh kembang mereka? Berapa banyak dana yang telah dialokasikan untuk berbagai upaya pemulihan bagi korban dan kelompok masyarakat yang bernama anak-anak. Persoalan utamanya bukan sebatas rinci dan besaran angkanya tersebut dan juga tidak sesederhana merespon dan menuangkannya dalam sebuah kebijakan tanpa memahami duka mereka akibat bencana tersebut.

Berbagai bantuan kemanusiaan mengalir, namun ini tidak bisa dilihat dari komponen penting pada saat darurat saja, namun perlu dipikirkan hal yang bersifat melengkapi (*komplementer*) untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri. Hal ini mengedepankan, bahwa bantuan kemanusiaan harus diikuti dengan proses pemulihan jangka panjang di semua tataran, baik yang bersifat khusus, menyangkut pendampingan dan pemulihan emosional korban, namun dengan sebisa mungkin memanfaatkan pendekatan tradisional-daerah yang umumnya bersifat partisipasi kelompok berbasis komunitas. Selain itu juga memperhatikan tataran yang bersifat struktural (*makro*) menyangkut tata sosial, ekonomi dan politik.

2. Dampak bagi kehidupan

Bencana alam telah membawa duka bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi rakyat Aceh. Kondisi pengungsian yang tidak memadai fasilitasnya serta terbatasnya pelayanan kebutuhan pangan, kesehatan serta pendidikan bagi anak-anak memberi dampak bagi perkembangan mereka. Hal ini tentunya juga menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah bahkan dunia Internasional. Isu pengungsi internal adalah isu besar yang menyangkut anak-anak. Antara 30-50% pengungsi adalah anak-anak. Isu anak-anak tidak sebatas pada kekurangan gizi ataupun putus sekolah saja. Akan tetapi derita ini juga diikuti dengan anak-anak yang mengalami ketercabutan dari tempat tinggalnya akibat dihantam bencana. Kondisi ini sangat rentan bagi mereka, karena saat mereka seharusnya berada di tengah-tengah lingkungannya untuk mengkonstruksikan dan mengidentifikasi dirinya dengan keluarga dan lingkungannya. Namun, justru pada saat itulah mereka mengalami kerusakan hubungan kekeluargaan bahkan kehilangan anggota keluarganya, menyaksikan kehancuran mekanisme sosial, kehilangan *role model*, dan mengalami ketakutan serta trauma yang berkepanjangan akibat bencana.

Kondisi tersebut membawa para pengungsi termasuk anak-anak didalamnya berada dalam krisis, mengalami kecemasan yang tinggi akibat dari bencana alam. Mereka tentunya membutuhkan cara-cara bagaimana mengatasi keadaan yang dideritanya tersebut, sehingga korban bencana alam ini membutuhkan bantuan untuk menghadapi kesukarannya. Mereka

dalam keadaan mudah diberitahu, diajar, atau disugesti. Oleh karena itu kebutuhan akan bantuan itu cukup sangat mendesak, dan harus diberikan dengan segera. Untuk menangani permasalahan pengungsi termasuk kelompok yang paling rentan yaitu anak-anak, dibutuhkan intervensi krisis. Menurut Korchin (1976) dalam buku *Peran Psikologi di Indonesia* (Supratiknya, 2000:34-35) menyebutkan bahwa tujuan *intervensi* krisis diantaranya adalah (1) mengurangi ketegangan, kecemasan, kebingungan, dan ketidakberdayaan; (2) mengembalikan orang yang dalam krisis ke fungsi sebelumnya; dan (3) membantu orang yang bersangkutan, keluarganya, dan orang-orang lain yang penting bagi penderita, belajar apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis tersebut, dan mengetahui sumber-sumber atau pelayanan-pelayanan di masyarakat yang dapat membantu. Melalui penanganan khusus terhadap korban bencana alam, diharapkan mampu memberikan nilai serta nuansa yang aman dan mampu mengembalikan fungsi sosial mereka. Hal ini menjadi sangat penting khususnya bagi tumbuh kembang anak-anak.

Sekitar 394.285 orang pengungsi (Departemen Sosial, 2005) hidup di berbagai lokasi penampungan di Nanggroe Aceh Darussalam. Sejak bencana tsunami Desember tahun 2004 kemarin banyak di antara mereka yang masih berada dalam ketidakpastian kemana mereka akan menuju. Kondisi seperti ini membawa berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat pengungsi itu termasuk anak-anak yang kena dampaknya.

Secara umum ada beberapa dampak (ekonomi, sosial dan mental spiritual) yang dialami oleh pengungsi diantaranya adalah :

a. Dampak Ekonomi

- Hilangnya mata pencaharian dan menurunnya daya beli, bencana alam telah menghancurkan sebagian besar tempat mereka bekerja dan peralatan untuk mencari mata pencaharian, seperti daerah nelayan di sepanjang pesisir pantai di Aceh telah menghancurkan perkebunan, tambak dan perahu untuk mencari ikan. Selain itu, juga hancurnya tempat-tempat perekonomian di NAD juga mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pokok yang berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya kebutuhan pokok yang tersedia di daerah bencana, walaupun ada jumlahnya terbatas dan harganya cukup mahal.
- Ketergantungan pada bantuan pihak luar, (baik pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, International NGO atau lembaga dan kelompok peduli lainnya) sangat tinggi karena hilangnya harta benda, tempat tinggal dan kehilangan mata pencaharian mereka.

b. Dampak Sosial

- Merosotnya kondisi kesehatan, kebutuhan dasar untuk anak-anak makan 2 atau 3 kali sehari dengan menu yang sangat terbatas pada nasi dan sayuran serta lauk seadanya. Namun demikian, sebagian pengungsi juga masih

menerima bantuan beras dan makanan yang jatahnya semakin menipis. Sehingga kekhawatiran akan kurangnya pangan atau gizi buruk dapat terjadi. Kekurangan gizi dan kematian balita juga sering terjadi di lokasi barak-barak pengungsian, karena buruknya kesehatan dan sanitasi lingkungan seperti ISPA, diare, gatal-gatal merupakan penyakit yang sering kali dialami anak-anak.

- Hilangnya kesempatan sekolah, aspek pendidikan, pendidikan pra sekolah tidak tersedia di semua lokasi pengungsian. Tingkat pendidikan SD sampai SLTA terdapat anak-anak yang putus sekolah. Mereka umumnya tidak memperoleh pendidikan non formal sebagai pengganti pendidikan formal. Anak-anak yang masih sekolah umumnya mengalami lebih dari satu kesulitan seperti kekurangan biaya, terbatasnya peralatan dan seragam sekolah, lokasi sekolah yang relatif jauh atau belajar di sekolah darurat dalam tenda-tenda, sehingga juga mempengaruhi kemampuan anak untuk menangkap pelajaran.

c. Dampak Mental Spiritual

- Trauma Psikologis, banyak di antara pengungsi yang menderita trauma psikologis yang parah karena kehilangan anggota keluarganya, trauma karena bencana tsunami yang menggulung kampung halaman mereka serta ditambah dengan kondisi pengungsian yang serba terbatas fasilitasnya. Dampak psikologis sangat dirasakan oleh

anak-anak yang kehilangan orang tua atau keluarga mereka sehingga harus hidup terpisah bahkan tanpa pendamping sama sekali. Berdasarkan data *Children Center*, Direktorat Pelayanan Sosial Anak Departemen Sosial RI bulan Juli ada sekitar 1.815 anak yang terpisah dan tanpa pendamping akibat bencana alam gempa bumi dan tsunami di NAD, Sumut dan Nias, yang dikelola oleh Departemen Sosial termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan beberapa lembaga perlindungan anak dapat dilihat dalam tabel berikut:

Jumlah tersebut tentunya tidak sedikit, anak-anak yang terpisah dengan orangtuanya atau keluarganya dan hidup tanpa pendamping cukup rawan dengan berbagai permasalahan sosial. Peristiwa gempa bumi dan tsunami tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang mereka.

- Munculnya rasa putus asa, belum adanya keputusan dan pemecahan permasalahan pengungsi mengakibatkan munculnya rasa apatis, putus asa dan frustrasi di antara para pengungsi. Kondisi ini tentunya juga dipengaruhi belum terbangunnya infrastruktur dan terbatasnya pelayanan sosial yang tersedia di daerah bencana.

Berbagai dampak yang dialami pengungsi, termasuk di dalamnya anak-anak membawa berbagai kondisi yang cukup memperhatikan dan memerlukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut untuk kehidupan yang lebih baik. Bahkan trauma yang diakibatkan oleh bencana

Tabel 2: Rincian Jumlah Anak Terpisah dan Tanpa Pendamping (NAD, Sumut Dan Nias) Per - 4 Juli 2005

No	Nama Lembaga/Institusi	Jumlah anak
1.	Depsos	148 anak
2.	ICRC	25 anak
3.	Cardi/IRC	60 anak
4.	Lost Children Operation	185 anak
5.	Muhammadiyah	353 anak
6.	Pusaka	524 anak
7.	Save The Children	126 anak
8.	Child Fund	253 anak
9.	Kementrian Pemberdayaan Perempuan (KPP)	141 anak
Jumlah		1815 anak

Sumber : Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, Depsos RI

dapat memberi efek yang dalam dan panjang terhadap perkembangan psikososial anak-anak. Ditemukan bahwa trauma, dapat menyebabkan pemahaman anak-anak akan makna dan tujuan hidup serta pembentukan identitas yang sehat menjadi rusak. Seperti yang dikatakan oleh Jansen (1996:418) "Pembentukan identitas yang sehat hanya dapat dibangun dengan landasan kepercayaan dan rasa aman, serta landasan sosial yang kuat bagi pembangunan personal maupun kolektif."

Begitu mendalamnya dampak yang dirasakan oleh anak-anak ini, tentunya memerlukan perhatian yang *intensif* dan berkesinambungan untuk meningkatkan sensitifitas dan kemampuan dalam merespon keadaan dan kondisi individu mereka. Dampak yang ditimbulkan dari bencana alam menyisakan duka yang mendalam,

karena itulah sangat penting untuk segera dilakukan upaya pemulihan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi psikologis anak-anak dan kondisi sosial masyarakat setempat.

3. MENGGALANG SOLIDARITAS

Cerita tentang seorang anak, sebut saja Salahudin (10) berlari kecil mengejar dentang lonceng sekolah di SDN Banda Aceh. Wajahnya berbinar, badannya dibalut baju pramuka rapi dengan bersepatu hitam. Di tangannya menenteng tas sekolah lengkap dengan alat tulisnya. Di pintu masuk kelas ia berpapasan dengan Bu Guru. Salahudin berhenti sejenak untuk menjabat tangan dan menciumnya sebagai tanda hormat. Di dalam kelas ia murid yang cerdas, pendiam, dan menjadi teladan. Sabtu

pagi yang cerah itu kegembiraan terakhir Salahudin. Minggu (26/12/2004), tsunami melumat habis Banda Aceh. Salahudin bersama teman sebayanya tersungkur dalam tragedi pilu. Sekolah yang indah tinggal jejak pondasi lapuk. Tangan Bu Guru yang dulu lembut mengelus rambut kepalanya kini tak lagi dirasa. Semua hanya dalam sejengkal waktu.

Sepenggal cerita di atas merupakan salah satu dari sekian banyak cerita tentang nestapa ribuan anak Aceh korban tsunami, kondisi tersebut telah menyodok kesadaran dan kepedulian banyak pihak lintas batas negara dan negara. Bantuan dana mengalir deras, bendera organisasi berkibar lebih meriah dari 17-an. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan *Non Government Organization* (NGO) International menyibak puing-puing luka masyarakat Aceh untuk disembuhkan. Beragam cara dan strategi dilakukan semata untuk para korban tsunami. Ribuan anak kehilangan orang tuanya dan tempat tinggal, sehingga mereka harus tinggal di tempat-tempat pengungsian. Kondisi pengungsian sangat memprihatinkan dan sebagian banyak tidak memenuhi syarat kesehatan.

Situasi pengungsian demikian, maka perlu disusun sebuah pendekatan sistematis untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di pengungsian. Pendekatan ini dimulai dengan memahami anak-anak melalui kacamata dunia tempat mereka hidup saat ini. Anak-anak ini bukanlah tubuh kecil yang semata-mata memerlukan makanan dan obat-obatan. Mereka adalah manusia kecil yang semula hidup di dalam keluarga dengan tradisi yang khas, dan dalam komunitasnya yang khas pula. Mereka

mempunyai cita-cita dan harapan, serta kemampuan untuk bertahan yang sesungguhnya bisa dikembangkan. Karena itulah sangat penting untuk menyediakan kesempatan mendengarkan anak-anak ini, untuk bersedia melihat persoalan anak-anak ini sepenuhnya demi kepentingan anak-anak itu sendiri.

Kondisi bencana memang tidak terlepas dari upaya untuk melakukan penyelamatan darurat, namun yang harus diperhatikan adalah juga pemahaman bahwa pemulihan kondisi psikologis sama pentingnya dengan pemulihan luka fisik. Bagaimanapun, penanganan anak-anak ini tidak bisa dipisahkan dari penanganan dan perlindungan terhadap keluarga dan komunitas yang sedang mengalami duka akibat bencana. Anak, keluarga, dan komunitas memerlukan pertolongan sebagai bagian dari sebuah kesatuan. Berbagai upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi pengungsi anak bertujuan untuk menyelamatkan, melindungi, dan menjamin hak-hak pengungsi akan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi dengan menciptakan dan menjamin kehidupan yang layak bagi anak-anak.

Menurut Pat Pridmore dkk dalam buku *Anak-anak Membangun Kesadaran Kritis*, (2002:355) ada beberapa hal yang menjadi prinsip dalam memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk terlibat aktif dalam proses pemulihan diantaranya :1) Memperhitungkan segala kebutuhan anak-anak, pandangan dan minat mereka (termasuk melibatkan mereka dalam proses inisiatif, perencanaan dan realisasi program; 2) Memperhitungkan realitas

sosial dan kebudayaan; 3) Pendekatan aksi praktek dalam segala tipe aktivitas.

Mempertimbangkan beberapa prinsip tersebut di atas maka proses solidaritas sosial antara anak-anak akan terwujud. Adaya proses pelibatan secara aktif dalam pemulihan yang dilakukan memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan dirinya. Selain itu juga tetap mempertimbangkan nilai-nilai budaya setempat. Hal ini akan memberikan semangat baru bagi anak-anak untuk beraktivitas kembali dan berkarya dalam komunitasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka berbagai upaya *pemulihan* terus dilakukan untuk mengembalikan fungsi sosial bagi para pengungsi korban bencana ini, termasuk untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak sebagai salah satu kelompok yang rentan. Untuk itu, mengembalikan kepercayaan dan membangkitkan kegembiraan pada anak-anak, salah satu proses pemulihan yang dilakukan adalah dengan melibatkan anak-anak dalam aktivitas sosial dan budaya sehingga dapat memulihkan rasa percaya dan identitas diri yang mendasar. Perlu mengeksplorasi dan mengadaptasi strategi-strategi alternatif, dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak-anak. Beberapa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Departemen Sosial dan dinas sosial serta instansi terkait di daerah dalam rangka penanganan anak bermasalah akibat bencana alam gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara antara lain adalah antara lain :

a. Penyelamatan, dalam tahapan penyelamatan ini telah dilakukan beberapa kegiatan untuk pengungsi

anak diantaranya adalah : Tanggap darurat; pembangunan dapur umum; infrastruktur dasar; penguburan korban yang meninggal dunia; penyelamatan korban yang masih hidup; dan penampungan darurat.

b. Perlindungan bagi anak-anak dalam pengungsian menjadi prioritas dalam upaya untuk mengatasi persoalan pengungsi anak, sehingga dilakukan beberapa upaya diantaranya :

- Melakukan pendataan anak yang berada di tempat-tempat pengungsian
- Bekerjasama dengan media masa dalam rangka sosialisasi konsep pengasuhan anak untuk menjawab adanya issue adopsi anak di masyarakat
- Menjalin kerjasama dengan media televisi (diantaranya Metro TV) dalam rangka koordinasi untuk pengasuhan anak korban bencana alam di NAD dan Sumatera Utara serta Nias melalui Posko Perlindungan Anak.
- Mencegah pelaksanaan adopsi ilegal, adopsi atau pengangkatan anak secara dini dan dalam keadaan darurat sangat mungkin menimbulkan permasalahan, pelanggaran perundang-undangan (UU Nomor 23/2004 tentang Perlindungan Anak), yang dapat menimbulkan putusan ikatan kekeluargaan antara anak dengan orang tua termasuk juga budaya setempat.
- Mencegah terjadinya trafficking anak, issue tentang trafficking anak telah merebak di masyarakat, untuk itu Departemen Sosial bekerjasama dengan media massa

serta kelompok relawan dan organisasi kemasyarakata/keagamaan telah melakukan penelitian ke beberapa yayasan atau lembaga sosial menyelesaikan issue tersebut.

- c. Pemberdayaan, mengembalikan anak-anak sesuai dengan fungsi sosialnya serta dengan mempertimbangkan tumbuh kembangnya menjadi salah satu bagian terpenting dalam tahap pemberdayaan yang dilakukan. Untuk tahap awal ada beberapa aktivitas yang dilakukan diantaranya melalau sekolah-sekolah darurat yang dilaksanakan di tenda-tenda. Hal itu akan terus berlanjut dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta upaya untuk mengembalikan tatanan sosial kehidupan anak-anak tersebut.
- d. Pemulihan, melalui pelayanan langsung terhadap pengungsi anak di berbagai lokasi pengungsian dengan penanganan trauma bencana pada pengungsi anak melalui trauma center di lokasi pengungsian melalui; Rumah Perlindungan Sosial Anak Banda Aceh; Rumah Perlindungan Sosial Anak Medan; Rumah Perlindungan Sosial Anak Bambu Apus Jakarta, serta penyiapan panti sosial untuk antisipasi permasalahan anak korban bencana alam di NAD dan Sumatera Utara.

Selain itu dalam upaya pemulihan terhadap gangguan psikososial yang dialami oleh anak-anak dilakukan beberapa pelayanan sosial emergency di lokasi pengungsian melalui Pusat Layanan Anak (*Children Center*) Aktivitas *children center* antara lain melalui; a) pelayanan psiko-sosial/konseling bagi anak-anak yang traumatis., b) *Play Therapy*, yaitu

mengembalikan anak-anak ke masa kanan-kanaknya melalui permainan yang telah disiapkan. c) *Recreational Care*, yaitu berbagai kegiatan rekreatif yang memungkinkan anak-anak terbebas dari kondisi yang traumatis

- e. Pemaduan program, merupakan bagian tindak lanjut dalam upaya pemulihan yang dilakukan, maka perlu adanya kesinambungan antara program yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dan memperoleh pengasuhan yang layak.
- f. Pendayagunaan kader dan potensi lokal, baik dari warga pengungsi, warga masyarakat sekitar lokasi pengungsian dan institusi masyarakat setempat. Pada tahap ini, sangat penting untuk menghimpun potensi masyarakat untuk memulihkan dan meningkatkan peran kelembagaan sosial masyarakat secara bertahap untuk mendorong pelayanan sosial bagi pengungsi anak di Aceh.

Melalui berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan pengungsi anak ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang efektif bagi penanganan pengungsi anak. Hal ini sangat penting untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada anak-anak sesuai hak-haknya dengan memperhatikan beberapa prinsip diantaranya :

- a. Non-diskriminasi, menegaskan bahwa segala upaya dan pearturan perundangan dan program-program untuk pengungsi anak serta implementasinya menetapkan tidak ada perlakuan berbeda-beda terhadap anak. Dengan tetap menghargai

harkat, martabat dan hak-haknya sebagai anak.

- b. Terbaik bagi Anak (*Best interest of the child*), segala upaya peraturan perundangan dan program-program dengan mengupayakan semua keputusan, kegiatan, dan dukungan untuk pengungsi anak serta implementasinya harus menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.
- c. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (*The right to life, survival and development*), segala upaya peraturan perundangan dan program-program untuk pengungsi anak serta implementasinya harus diarahkan untuk menjamin dan memberikan dukungan bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak (*Respect for the view of the child*), segala upaya peraturan dan program-program untuk pengungsi anak serta implementasinya harus didasarkan penghormatan terhadap pandangan anak yang diarahkan pada upaya-upaya positif dan konstruktif bagi upaya tumbuh kembang dirinya.

Berkaitan dengan konteks penanganan pengungsi anak, perlu mempertimbangkan banyak faktor yang menyangkut kepentingan anak-anak melalui perspektif anak. Perspektif pendekatan-pendekatan *charity* yang digunakan cenderung memandang anak-anak sebagai korban, bukan sebagai orang yang mampu menyelamatkan diri. Hal ini mengejutkan, mengingat kenyataan terjadinya krisis seringkali membuktikan bahwa ternyata anak-anak justru lahir

menjadi kepala rumah tangga. Mereka menjadi aktor sosial yang penting yang harus bertanggung jawab tidak saja demi kelangsungan hidup mereka sendiri tapi juga demi saudara-saudara mereka. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya memandang seluruh kelompok yang mengalami bencana, termasuk anak-anak dan perempuan juga memberikan posisi yang penting dalam upaya pemulihan (*recovery*) yang dilakukan. Hal ini menyangkut beberapa kepentingan yang menyangkut keberlangsungan hidup mereka.

Langkah-langkah penanganan pengungsi anak di Aceh memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, untuk itu perlu koordinasi antar pihak. Hal ini sangat penting, karena dalam pelaksanaannya seringkali justru mengakibatkan konflik atau tumpang tindih program. Kondisi ini tentunya juga akan berakibat terhadap penerima program pelayanan dalam memanfaatkan system sumber yang tersedia. Untuk itu diperlukan beberapa pendekatan dalam implementasi program untuk meningkatkan efektifitas program penanganan pengungsi anak sangat penting, diantaranya adalah :

- a. Basis Kelembagaan (*Institutional Based*), merupakan pendekatan dengan menggunakan jalur lembaga-lembaga yang terkait dalam penyelesaian masalah pengungsi anak dengan cara mobilisasi kebijakan, program dan sumber-sumber lainnya untuk pemenuhan kebutuhan pengungsi anak. Pendekatan ini diupayakan juga dengan memaksimalkan lembaga-lembaga local untuk terlibat dalam upaya pemulihan. Dengan demikian diharapkan dapat menjamin *sustainability* (keberlangsungan) program yang dilakukan.

- b. Basis Masyarakat (*Community Based*), merupakan pendekatan dengan menggunakan keluarga, pranata sosial dan hubungan-hubungan sosial untuk menggerakkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Anak-anak sebagai bagian dari komunitas setempat, memerlukan penanganan serius untuk mengurangi dampak yang diakibatkan bencana alam. Karena itulah, pendekatan komunitas diharapkan dapat membangun solidaritas sosial antara korban dengan tetap mempertimbangkan budaya dan kondisi sosial wilayah setempat.
- c. Basis pemenuhan kebutuhan anak (*Needs Based*) menuju pemenuhan hak-hak anak (*Right Based*), kebutuhan yang mendasar bagi anak-anak menjadi prioritas serta mengupayakan pemenuhan hak-hak anak. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak-anak menjadi salah satu hal yang mendasar untuk dapat dipenuhi. Namun dalam pelaksanaannya harus tetap mempertimbangkan pemenuhan hak anak sebagai ruh dalam program yang diimplementasikan. Melalui pemenuhan kebutuhan dasar menuju *right based*, diharapkan dapat memberikan penghargaan atas kepentingan anak-anak dengan menghargai hak-hak anak.

Penanganan anak-anak di pengungsian memerlukan perhatian secara khusus yang jauh lebih rumit daripada penanganan orang dewasa. Situasi penampungan pengungsi yang darurat tidak boleh menjadikan alasan untuk mengabaikan hak dasar anak-anak yang sudah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak. Pemerintah bertanggung jawab penuh

untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan anak-anak, secara khusus anak-anak dalam situasi sulit seperti pengungsian

Sebagai upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak adalah dengan melakukan program *reunifikasi*, yaitu dengan mengembalikan anak-anak untuk diasuh oleh keluarganya/ kerabatnya/ pendampingnya yang berhak. Departemen sosial dengan beberapa mitra kerjanya juga terlibat aktif dalam program reunifikasi terhadap anak-anak yang terpisah ataupun tanpa pendamping, dan berdasarkan data Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak Departemen Sosial RI, per 4 Juli 2005 terdapat 218 anak yang dikembalikan dari daerah bencana di Nanggroe Aceh Darussalam, Nias dan Sumatera Utara. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Melalui program *reunifikasi* ini diharapkan dapat mengurangi duka yang mendalam akibat kehilangan anggota keluarganya dan mereka mampu menjalankan fungsi sosialnya di komunitas. Namun yang perlu juga diingat dalam proses pemulihan, harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak-anak, salah satunya dengan tetap mempertimbangkan kondisi mereka serta memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk terlibat dalam proses yang dilakukan. Berdasarkan data Children Center Departemen Sosial RI, jumlah anak yang terpisah dan tanpa pendamping (NAD, Sumatera Utara dan Nias) bulan Juli 2004 sejumlah 1815 anak (lihat tabel 3). Sedangkan yang telah direunifikasi disebutkan sejumlah 218 anak (12.01 %). Hal ini menunjukkan masih banyak

anak-anak yang terpisah dengan orang tuanya dan tanpa pendamping. Kondisi ini tentunya memerlukan kerja keras dari berbagai pihak untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak tersebut. Ada beberapa program pelayanan yang harus dilakukan sehubungan dengan hal tersebut di antaranya :

- a. *Community and Family Care*, yaitu pengasuhan yang dilakukan dalam keluarga-keluarga. Model pelayanan ini bertujuan untuk memberikan pengasuhan bagi anak-anak dengan tetap berada dalam komunitas sosial yang tidak jauh berbeda dengan daerah asalnya. Hal ini diharapkan dapat membantu anak-anak ini untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan adat budaya setempat.
- b. *Residential Care*, yaitu menempatkan anak-anak dalam panti-panti

- pemerintah maupun masyarakat termasuk pesantren-pesantren yang berada di NAD. Beberapa anak-anak pengungsi masih berada dalam kondisi tanpa pendamping karena kehilangan orang tua maupun keluarganya, oleh karena itu perlu dicarikan keluarga pengganti melalui pelayanan panti-panti sosial anak. Dengan pelayanan panti, diharapkan anak-anak mendapatkan haknya untuk tetap hidup dan berkembang serta mendapatkan pelayanan dasar yang memadai.
- c. *Sponsorship*, yaitu pemberian bantuan secara reguler oleh para dermawan dari seluruh Indonesia, kepada anak-anak yang membutuhkan namun yang tetap tinggal dan berada di tengah keluarga mereka.

Tabel 3: Rincian Jumlah Anak yang Telah Direunifikasi (NAD, Sumut dan Nias) Per -4 Juli 2005

No	Nama Lembaga/Institusi	Jumlah anak
1.	Depsos	72 anak
2.	ICRC	37 anak
3.	Cardi/IRC	1 anak
4.	Lost Children Operation	25 anak
5.	Muhammadiyah	8 anak
6.	Pusaka	21 anak
7.	Save The Children	49 anak
8.	Child Fund	1 anak
9.	Kementrian Pemberdayaan Perempuan (KPP)	4 anak
Jumlah		218 anak

Sumber : Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, Depsos RI

Di samping itu sangat penting sebagai sebuah proses pembelajaran untuk memberikan arti kebersamaan dalam upaya pemulihan (*recovery*) yang dilakukan. Cukup banyak agenda yang harus dilakukan dalam "Aceh Recovery" ini, namun upaya untuk memberikan porsi yangimbang antara korban/pemanfaat langsung dengan "Pemberi dana" perlu adanya kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Seringkali, masing-masing pihak punya kepentingan atas nama "kemanusiaan". Perlu digarisbawahi, proses pemulihan yang dilakukan perlu melibatkan secara aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk anak-anak. Melalui peran serta dari setiap komponen yang terlibat dalam proses pemulihan, akan memberikan hasil yang maksimal bagi wilayah pascabencana untuk memulai aktivitasnya dan terlibat dalam pembangunan yang direncanakan dan yang sedang berlangsung.

Sudah seharusnya agenda untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi anak ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dalam situasi darurat karena bencana alam dan harus menjadi pengungsi. Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi harus dilaksanakan sesuai dengan hukum ketentuan kemanusiaan (*humaniter*). Hal ini menyangkut perlindungan yang harus diberikan secara khusus dengan memperhatikan hak hidup (*rights to life*) dan hak kelangsungan hidup dan perkembangannya (*rights to survival and development*). Terpenting adalah juga dengan memberikan kesempatan kepada

anak-anak untuk dihargai pendapatnya. Memberikan hak atas anak-anak tersebut, maka akan memberikan manfaat yang cukup besar dalam proses *recovery* yang dilakukan di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan wilayah pascabencana lainnya.

4. SIMPULAN

Memberikan dan melakukan sesuatu yang berarti dalam sebuah upaya pemulihan merupakan sebuah tujuan untuk pelayanan dan perlindungan bagi korban bencana, sehingga mereka mendapatkan kesempatan untuk menjalankan fungsi sosialnya. Berbagai upaya pemuliham dilakukan terhadap daerah pascabencana di Aceh. Sumbangan dana dari berbagai pihak terus mengalir, namun sampai sejauh ini bagaimanakah proses pemulihan yang dilakukan. Apakah cukup memberikan manfaat bagi anak-anak, dan yang paling penting apakah program tersebut juga melibatkan secara aktif untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan kembali di wilayah tersebut. Berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik lokal maupun internasional, seringkali masih menggunakan pendekatan atas-bawah. Bantuan yang diberikan seringkali kurang memperhatikan kebutuhan pengungsi yang sebenarnya. Oleh karena itu diharapkan partisipasi anak-anak dan komunitas setempat menjadi salah satu prioritas dalam mengatasi pengungsi anak, dengan mempertimbangkan budaya setempat. Diperlukan keseriusan, keikhlasan, sampai menyentuh manajemen dan sumber daya manusia yang musti disiapkan. Jika

sekedar 'program' tanpa komitmen atas dasar kemanusiaan, ibarat kail tanpa umpan. Ketika anak-anak merupakan bagian dari pengungsi, maka suara, kebutuhan dan aspirasi mereka pun harus lebih mewarnai seluruh program pemulihan di bumi Aceh.

PUSTAKA ACUAN

- Anonim, 2004. "Perempuan di antara Agenda Besar Aceh Recovery." *Jurnal Perempuan*, No. 33, hal 23-38.
-, 2000, *Kebijakan Dasar Penyelesaian Masalah Pengungsi Anak*. Jakarta; Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial/Kantor Masalah-masalah Masyarakat.
-, 2000. *Pola Penyelesaian Masalah Pengungsi*. Jakarta; Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI.
- Anonim, 2005. *Peran Bank Nasional dalam Restorasi Pascabencana*, *Republika* 25 Mei 2005.
- Carter, W. Nick 1991. *Disaster Management, a Disaster Manager's Handbook*. Manila; ADB
- Macksoud Mona, 1993. *Membuat Anak Tersenyum Kembali*. Jakarta; Sastra Tjitra.
- Susilawati Ima dkk, 1999. *Konvensi Hak Anak*. Jogjakarta; sahabat Remaja PKBI DIY-UNICEF.
- Sularto, 2000. *Seandainya Aku Bukan Anakmu*. Jakarta; Penerbit Buku Kompas.
- Supratiknya, dkk. 2000. *Peran Psikologi di Indonesia*. Jogjakarta; Yayasan Pembina Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Sudiby Markus, 2005. *Optimalisasi dan Manajemen Dana Filantropi bagi Pemulihan Sosial Pasca Bencana*. (Makalah dalam Seminar Nasional "Revitalisasi Filantropi Bagi Pemulihan Sosial Pasca

Bencana" yang diselenggarakan UMJ 21 April 2005)

Victoria Johnson, dkk, 2002. *Anak-Anak Membangun Kesadaran Kritis*. Jogjakarta; Tim Read Books.

Yanuar Farida Wismayanti, Staf pada Bidang Kerjasama dan Publikasi, Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Balatbangsos, Depsos RI.